

PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA

Melisa Eka Sari¹, Fefri Indra Arza², Salma Taqwa²

¹)Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

^{2,3})Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: mellisaekasari@gmail.com

Abstracts: *This research aim to determine the effect of accountability, suitability of compensation and intern control. Type of this research on causality. The population in this study was in village at Lima Puluh Kota. This research uses the total sampling technique so that the entire population in used as the research sample. The data source is primary data. Methods of collecting data by distributing questionnaires. The result of the research concluded that accountability, suitability of compensation had a significant negative effect and internal control had a significant positive effect on potential fraud.*

Keywords: *Akuntabilitas; Dana Desa; Kesesuaian Kompensasi; Pengendalian Intern; Potensi Kecurangan*

How to cite (APA 6th style)

Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri E, 1443-1457.

PENDAHULUAN

Adanya dana desa pemerintah berharap pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan. Selain mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan kedepan harus menjadi pokok pembahasan yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah kongkrit pemerintah tidak digembosi oleh persoalan misalnya kecurangan terhadap dana desa tersebut.

Korupsi di dana desa merupakan salah satu masalah mendasar disebabkan karena anggaran yang besar namun implementasi di level desa tidak di iringi transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. Dari Tahun 2015-2017 korupsi di dana desa ditemukan sebanyak 154 kasus korupsi anggaran dana desa dengan beragam modus korupsi dana desa diantaranya praktik penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif dan penggelembungan anggaran. Korupsi di dana desa menyebabkan kerugian negara dengan total Rp47,56 milyar (antikorupsi.org)

Penggunaan dana desa di Sumatera Barat jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dana tersebut rentan diselewengkan. “seluruh wali nagari di daerah ini fokus jadi perhatian KPK”. Hal itu dikemukakan juru bicara KPK Febri Diansyah dalam satu acara di Universitas Negeri Padang (Kompasiana.com). Puluhan wali nagari di Kabupaten Limapuluh Kota dikumpulkan oleh tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kamis tanggal 24 Agustus 2017. Hal itu dilakukan dalam menghindari penyelewengan serta penyalahgunaan dana desa (nagari) oleh pemerintahan nagari setelah sebelumnya beberapa walinagari diperhentikan dari jabatan karena melakukan korupsi dana desa dan akan di proses secara hukum (harianhaluan.com). Isu ini menjadi penting karena riset Agustin et.al (2017) di kabupaten Pasaman Barat menemukan bahwa 78,57% nagari di kabupaten Pasaman Barat yang telah memiliki kesadaran tinggi untuk mempublikasikan penggunaan anggaran nagari pada media massa maupun radio komunitas

Penelitian Oktaviani (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kecurangandalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Sanuari (2014) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel yang diambil, penambahan variabel independen akuntabilitas serta tempat dan waktu penelitian yang berbeda. Penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kasus yang telah disebutkan diatas.

Dari uraian tersebut, dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian guna menguji apakah akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa, Selanjutnya Penelitian Ini Diberi Judul “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kapubaten Lima Puluh Kota)”.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007: 530) konsep keagenan adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan agen *agent*. *Principal* memperkejakan *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, namun *principal* dan *agent* mempunyai perbedaan prefensi dan tujuan. Dalam perusahaan (organisasi sektor bisnis) pemegang saham atau atasn bertindak sebagai *principal*, dan *chief executive officer (CEO)* dan bawahan sebagai *agent* mereka. Dalam organisasi sektor publik, atasan bertindak sebagai *principal*, dan bawahan sebagai *agent* mereka.

Pada organisasi sector publik dibangun atas dasar teori agensi. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi masyarakat desa (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi perpanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan teori agensi, pengelolaan keuangan desa harus di awasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

Kecurangan

Definisi *fraud* menurut Blaks Law Dictionary yang dikutip oleh Karyono (2013:4) adalah “Kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau memaksakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu”.

Tunggal (1992) mengatakan kecurangan (*fraud*) secara singkatnya dinyatakan sebagai suatu penyajian palsu atau menyembunyian fakta material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan haknya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindakan yang tidak wajar yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran, oleh karena itu *fraud* harus dicegah sedini mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Jenis-Jenis kecurangan adalah (1) penyalahgunaan asset (2) kecurangan laporan keuangan dan (3) korupsi. Pencegahan kecurangan merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2013:47). Kecurangan merupakan suatu masalah yang ada didalam perusahaan yang harus dicegah sedini mungkin, jika kecurangan tidak bisa dicegah maka perusahaan bisa mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, oleh karena itu manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat agar perusahaan terhindar dari kecurangan

Amrizal (2004:5) menyatakan ada empat cara yang dilakukan untuk mencegah kecurangan, yaitu membangun sistem pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, dan mengefektifkan fungsi audit internal

Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Menurut Undang-Undang No 6 Tentang Desa menyebutkan tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perkenomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di alokasikan secara adil dan merata kepada setiap desa yang telah dihitung berdasarkan proporsi dan formuladana desa. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dan desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dan desa, proses persyaratan dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017.

Prinsip penggunaan dana desa adalah keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya serta tipologi desa. pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas dana desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa tersebut adalah transparan, akuntabilitas, partisipatif, tertib disiplin dan anggaran

Akuntabilitas

Dalam pandangan Mardiasmo (2006), ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas. *Pertama*, adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi. *Kedua*, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. *Ketiga*, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

Menurut Elwood (1993) dalam Kurnia (2014) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*) terkait dengan penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur akuntansi.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD dan masyarakat luas

Kesesuaian Kompensasi

Menurut Veithzal (2006: 741) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan.

Menurut Veithzal (2006) dalam Sanuari (2014) , kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dalam dua bentuk yaitu :

a. Kompensasi yang bersifat finansial

Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu, kompensasi langsung, terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi. Kompensasi tidak langsung atau benefit, terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

b. Kompensasi yang bersifat *non financial*

Bentuk kompensasi ini seperti pujian, menghargai diri sendiri, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktifitas, dan kepuasan.

Pengendalian Intern

Menurut *committee of the American Institute of Accountants* (AICPA) dalam Sanuari (2014) defenisi pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, peningkatan efisiensi usaha, dan mendorong ditaati kebijakan manajemen yang di terapkan. Konsep dalam pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan khusus organisasi dapat dicapai. Struktur pengendalian intern terdiri dari tiga elemen yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Keandalan dan ketelitian catatan akuntansi ditentukan oleh tiga elemen struktur pengendalian.

Ada dua pendekatan sistem pengendalian didalam organisasi (Bastian : 2002) yaitu:

a) Pendekatan dari sudut pengolahan transaksi organisasi.

Pengolahan transaksi bersumber dari data yang diproses untuk menghasilkan informasi. Pendekatan ini berhubungan dengan kegiatan pengendalian akuntansi berupa pengendalian yang berhubungan dengan transaksi atau aplikasinya dan pengendalian yang bersifat umum.

b) Pendekatan dari sudut aspek manajerial dan pengambilan keputusan

Aspek manajerial dan pengambilan keputusan hendaknya didukung oleh sistem informasi yang akan menciptakan sistem pengendalian. Sistem informasi ini disebut sistem pengendalian manajemen yang meliputi kegiatan membandingkan realisasi dengan kriteria perencanaan sebagai landasan pengambil tindakan koreksi.

A. Hipotesis

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

H2 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

H3 : Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap potensi kecurangan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausitas, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variable dependen dengan independen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 79 desa di Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode total sampling. Jenis data yang digunakan adalah sata subjek, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dengan menggunakan kuesioner dari subjek penelitian yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden (Gambaran Umum Responden)

Tabel 1
Penyebaran dan Pengembalian kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kuesioner yang disebar	237
Jumlah kuesioner yang kembali	159
Respon Rate	67,08%

Berdasarkan tabel 1 diatas, kuesioner yang dikembalikan berjumlah 159, yaitu dengan persentase pengembalian kuesioner adalah sebesar 67,08%. Hal ini menjelaskan bahwa kuesioner yang disebarkan cukup tinggi tingkat pengembaliannya.

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 2
Uji Validitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil
Potensi Kecurangan (Y)	0.215
Akuntabilitas (X1)	0.379
Kesesuaian Kompensasi (X2)	0.433
Pengendalian Intern (X3)	0.594

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel 2 uji validitas di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen yaitu lebih dari 0,159. Untuk instrumen Akuntabilitas (X₁) diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* sebesar 0,379, Kesesuaian Kompensasi (X₂) adalah sebesar 0,433, Pengendalian Intern (X₃) adalah sebesar 0.594 dan untuk potensi kecurangan (Y) sebesar 0,215. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan variabel Y, X₁, X₂, dan X₃ adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Ket
Potensi Kecurangan (Y)	0.640	Reliabel
Akuntabilitas (X1)	0.810	Reliabel
Kesesuaian Kompensasi (X2)	0.605	Reliabel
Pengendalian Intern (X3)	0.659	Reliabel

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing

variabel dari kuesioner adalah *reliabel* sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

3. Uji Normalitas

Tabel 4
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		159
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15756105
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.049
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.883
Asymp. Sig. (2-tailed)		.417

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0,417 > 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.553	2.100		1.692	.093
Akuntabilitas	.008	.041	.023	.187	.852
kesesuaian kompensasi	-.011	.082	-.011	-.131	.896
pengendalian intern	-.041	.052	-.096	-.783	.435

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig $> 0,05$ yaitu $0,852 > 0,05$ untuk akuntabilitas, $0,896 > 0,05$ untuk

variable kesesuaian kompensasi dan $0,435 > 0,05$ untuk variabel pengendalian intern. Artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Deskriptif Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan deskripsi dari hasil penelitian tentang akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Lima Puluh Kota Variabel-Variabel tersebut dapat dikategorikan berdasarkan :

a) Distribusi Variabel Potensi Kecurangan (Y)

Distribusi frekuensi skor variabel potensi kecurangan terdapat 12 buah pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel potensi kecurangan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Variabel Potensi Kecurangan

No	Pernyataan	Rata-Rata	TCR (%)	Ket
1.	Perangkat desa mencatat tanggal transaksi tidak sesuai dengan waktu transaksi yang sebenarnya	4,62	92	Sangat Baik
2.	Kepala desa seharusnya berusaha untuk tidak menerima berbagai pendapat fiktif yang ada di kantor desa	4,52	90	Sangat Baik
3.	Kepala desa tidak memperkecil biaya-biaya yang tercatat di dalam pembukuan dana desa agar laporan dana desa terlihat lebih baik.	4,73	95	Sangat Baik
4.	Perangkat desa melaporkan pengungkapan atas laporan keuangan yang memadai dan tidak ada yang ditutup-tutupi	4,72	94	Sangat Baik
5.	Perangkat desa menilai kembali atas aset yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4,65	93	Sangat Baik
6.	Dana desa harus dikelola oleh orang yang bertanggungjawab dan jujur	4,68	94	Sangat Baik
7.	Di desa tidak terjadi pengeluaran yang ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	4,52	90	Sangat Baik
8.	Perangkat desa tidak menggunakan aset untuk kepentingan pribadi	4,67	93	Sangat Baik
9.	Kepala desa membuat perencanaan yang mengutamakan kepentingan pribadi	4,64	93	Sangat Baik
10.	Desa tidak menerima suap dalam bentuk apapun	4,63	93	Sangat Baik
11.	Kepala desa tidak memberikan hadiah kpd rekan bisnisnya setelah membuat sebuah kesepakatan tertentu	4,68	94	Sangat Baik
12.	Di desa tidak pernah ditemukan praktik pemerasan yang dilakukan terhadap karyawan atau masyarakat	4,49	90	Sangat Baik
	Rata-Rata	4,62	92,5	Sangat Baik

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan no.3, dengan tingkat capaian responden 95%

kategori sangat baik,yaitu kepala desa tidak memperkecil biaya-biaya yang tercatat di dalam pembukuan dana desa agar laporan dana desa terlihat lebih baik.,sedangkan untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan no.12 yaitu sebesar 90%.Rata-rata tingkat capaian responden pada variabel potensi kecurangan adalah sebesar 92,5%, dengan demikian rerata tingkat capaian responden variabel potensi kecurangan dikategorikan sangat baik.

b) Distribusi Variabel Akuntabilitas (X1)

Distribusi frekuensi skor variabel akuntabilitas terdapat 13 buah pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel budaya organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas

No	Pernyataan	Rata-Rata	TCR (%)	Ket
1.	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan perangkat desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat	4,82	96	Sangat baik
2.	Kebijakan yang diambil sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat	4,72	94	Sangat baik
3.	Perangkat desa memberikan laporan akuntabilitas kinerja tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada pemerintah daerah dan masyarakat	4,70	94	Sangat baik
4.	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan oleh perangkat desa bersama pemerintah daerah sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik atau masyarakat	4,69	94	Sangat baik
5.	Program-program dana desa dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi bahwa dana desa menghasilkan output yang maksimal	4,69	94	Sangat baik
6.	Program-program dana desa dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target dan tujuan kepentingan publik atau masyarakat	4,67	93	Sangat baik
7.	Pelaksanaan program-program dana desa benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	4,62	92	Sangat baik
8.	Pengalokasian dana desa mengikuti proses-proses dari prosedur yang berlaku	4,53	91	Sangat baik
9.	Penggunaan dana desa didasarkan atas peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis dan pelaksanaannya	4,64	93	Sangat baik
10.	Perangkat desa mampu menyusun semua laporan keuangan untuk dana desa (Laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan)	4,64	93	Sangat baik
11.	Perangkat desa jujur dalam mempertanggungjawabkan setiap laporannya	4,62	92	Sangat baik
12.	Adanya sanksi hukum yang tegas bagi aparat dan instasinya dalam penyalahgunaan wewenang	4,65	93	Sangat baik

13.	Penggunaan dana desa didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku	4,69	94	Sangat baik
	Rata-Rata	4,66	93,3	Sangat baik

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan no.1 dengan tingkat capaian responden 96% kategori sangat baik, yaitu Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan perangkat desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pada pernyataan no.2 dengan tingkat capaian responden sebesar 94%, Kebijakan yang diambil sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat, untuk rata-rata tingkat capaian responden pada variabel akuntabilitas adalah sebesar 93,3%, dengan demikian dapat dikategorikan sangat baik secara keseluruhan.

c) Distribusi Variabel Kesesuaian Kompensasi (X2)

Distribusi frekuensi skor variabel kesesuaian kompensasi terdapat 3 buah pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel kesesuaian kompensasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Distribusi Frekuensi Variabel Kesesuaian Kompensasi

No	Pernyataan	Rata - Rata	TCR (%)	Ket
1	Kompensasi keuangan yang diberikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan	4,62	92	Sangat Baik
2	Kepala desa menciptakan kondisi sehingga diakui bahwa semua karyawan memang menguasai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing	4,53	91	Sangat Baik
3	Promosi di kantor desa dilakukan setiap tahunnya	4,62	92	Sangat Baik
	Rata-Rata	4,58	91,7	Sangat Baik

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan no.1 dengan tingkat capaian responden 92% kategori sangat baik, yaitu Kompensasi keuangan yang diberikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, sedangkan untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan no.2 dengan tingkat capaian responden 91%, untuk rata-rata tingkat capaian responden pada variabel kesesuaian kompensasi adalah sebesar 91,78% dengan kategori sangat baik.

d) Distribusi Variabel Pengendalian Intern (X3)

Distribusi frekuensi skor variabel pengendalian intern terdapat 11 buah pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel pengendalian intern adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Distribusi Frekuensi Variabel Pengendalian Intern

No	Pernyataan	Rata-Rata	TCR (%)	Ket
1.	Kepala desa memberikan contoh perilaku etis dan beretika kepada seluruh staff dan masyarakatnya	4,63	93	Sangat Baik
2.	Kepala desa tidak menetapkan tingkat kompetensi kepada bawahannya	4,69	94	Sangat Baik
3.	Kantor desa mempunyai tim khusus yang berpengalaman dan independen untuk pemeriksaan laporan keuangan desa	4,64	93	Sangat Baik
4.	Kantor desa tidak memiliki kebijakan tertulis dan indikator kerja	4,64	93	Sangat Baik
5.	Kantor desa memiliki struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan	4,45	89	Sangat Baik
6.	Kantor desa tidak memiliki kebijakan pembaruan tugas dan tanggungjawab yang jelas	4,52	90	Sangat Baik
7.	Kantor desa menetapkan kebijakan tertulis tentang perekrutan, orientasi, pelatihan, motivasi, promosi, kompetensi dan perlindungan bagi staff nya	4,48	90	Sangat Baik
8.	Kantor desa menilai tingkat resiko terkait denga produk dan transaksi-transaksi penggunaan dana desa	4,62	92	Sangat Baik
9.	Kantor desa tidak menetapkan pengukuran resiko	4,64	93	Sangat Baik
10	Kantor desa tidak menentukan batas dan toleransi resiko	4,62	92	Sangat Baik
11	Kantor desa menetapkan adanya pengendalian intern	4,69	94	Sangat Baik
	Rata-Rata	4,59	91,8	Sangat Baik

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan no.2 dengan tingkat capaian responden 94% kategori sangat baik,yaitu Kepala desa tidak menetapkan tingkat kompetensi kepada bawahannya,seandainya untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan no.5 dengan tingkat capaian responden 89%,untuk rata-rata tingkat capaian responden pada variabel kesesuaian kompensasi adalah sebesar 91,8% dengan kategori sangat baik.

B. Hasil Analisis Regresi

Tabel 10
Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.960	3.829		7.302	.000
	akuntabilitas	-.003	.075	-.004	.043	.966
	kesesuaian kompensasi	-.049	.150	-.022	.329	.742
	pengendalian intern	.562	.096	.586	5.877	.000

a. Dependent Variable: potensi kecurangan

\Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 10 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 27.960 + -0,003X_1 + -0,049X_2 + 0.562 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Potensi kecurangan
- X1 = Akuntabilitas
- X2 = Kesesuaian Kompensasi
- X3 = Pengendalian Intern

Uji Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan perhitungan R² menggunakan SPSS diperoleh nilai *Adjusted RSquare* sebesar 0.324. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern memiliki kontribusi dalam menjelaskan variabel potensi kecurangan sebesar 32.4%, sedangkan 67.6% lainnya ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini

2. Uji F (F-Test)

Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai F = 26.276 dan signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $26.276 > 3,05$ (sig. 0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan

C. Uji Hipotesis

Uji t statistik (t-test) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas (db) = $n - k - 1 = 159 - 2 - 1 = 156$ adalah 1.654, berdasarkan hasil analisis pada tabel 17 maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Hipotesis Pertama (H1)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1.654, untuk variabel akuntabilitas (X_1) nilai t_{hitung} adalah -0,043 dan nilai sig adalah 0,966, dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,043 < 1,654$ atau nilai signifikansi $0,966 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif yaitu -0,003. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas (X_1) berpengaruh signifikan negatif terhadap pencegahan potensi kecurangan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) **ditolak**.

Hipotesis Kedua (H2)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1.654, untuk variabel kesesuaian kompensasi (X_2) nilai t_{hitung} adalah -0,329 dan nilai sig adalah 0,742, dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,329 < 1,654$ atau nilai signifikansi $0,742 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai negatif yaitu -0,049. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi (X_2) berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) **ditolak**.

Hipotesis Ketiga (H3)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1.654, untuk variabel pengendalian intern (X_3) nilai t_{hitung} adalah 5,877 dan nilai sig adalah 0,000, dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,877 > 1,654$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,562. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap potensi kecurangan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H_3) **diterima**.

Pembahasan

Pada bagian ini dilakukan pembahasan berkaitan dengan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, adapun hasil pembahasannya adalah :

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Potensi Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan, hal ini menunjukkan bahwa staff nagari belum mempunyai akuntabilitas tinggi terhadap dana desa sehingga kemungkinan akan terjadi potensi kecurangan terhadap dana desa.

Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang maupun badan-badan yang terpilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan tindakannya (Budi Mulyana, 2006 dalam

Setiawan, 2012). Dalam hal ini perangkat desa harus terbuka dan responibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangan sehingga besar harapan perangkat desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel dan transparatif. Hal ini dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kecurangandalam pengelolaan keuangan desa. Makin rendah akuntabilitas maka akan terjadi potensi kecurangan terhadap dana desa.

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Potensi Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan, hal ini menunjukkan staff nagari belum merasa puas dengan kompensasi yang diterima sehingga kemungkinan menimbulkan adanya potensi kecurangan terhadap dana desa dapat dihindari.

Jensen and Meckling (1976) dalam penelitian Thoyibatun (2009) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan antara principal dan agen dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, dengan mengeluarkan biaya monitoring. Dengan kompensasi yang sesuai, perilaku kecurangan akuntansi dapat berkurang. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanuari (2014) menjelaskan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dimana makin kecil kompensasi yang diterima maka mereka akan cenderung untuk melakukan kecurangan terhadap dana desa.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap potensi kecurangan, hal ini bukti bahwa pimpinan telah menciptakan pengendalian yang baik terhadap dana desa sehingga tidak terjadi lagi potensi kecurangan terhadap dana desa.

Wilopo (2006), menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi. Boyton (2000:372) semua perusahaan publik harus memelihara pengendalian internal yang akan menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan yang curang akan dicegah atau dideteksi dari awal. Menurut Agoes (2009:229) kecurangan dapat dicegah dengan cara membangun struktur pengendalian yang baik, pilih karyawan yang jujur dengan seleksi pegawai secara ketat, meningkatkan keandalan departemen audit internal, memberikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, lakukan *rotation of duties* dan karyawan wajib menggunakan hak cuti, pembinaan rohani, memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, menimbulkan iklim keterbukaan dalam perusahaan dan membuat kebijakan tertulis mengenai *fair dealing*.

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanuari (2014) menjelaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan negative terhadap potensi

kecurangan dana desa (2) Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa (3) Pengendalian intern berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa

Keterbatasan

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian, karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

Saran

Adapun saran peneliti untuk perusahaan kedepannya adalah (1) Metode penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara untuk menguatkan bukti penelitian. (2) Menambahkan variabel lain dalam penelitian ini, seperti motivasi dan budaya organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. 5(2). 1019-1028.
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2007. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Ke-11. Buku I. Jakarta. Salemba Empat
- Amrizal.2004. *Pencegah Fraud dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Audit Internal* .Alfabeta. Bandung
- Ellwood. 1993. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*.Bima Aksara, Jakarta, 2001.
- <https://antikorupsi.org/>
- <https://www.kompasiana.com/adibermasa/5a426066bde5752cea708b02/jadi-perhatian-kpk-dana-desa-di-sumbar-rawan-diselewengkan> diakses tanggal 01 November 2018
- <https://www.harianhaluan.com/news/detail/66394/jaksa-kumpulkan-walinagari-selimapuluh-kotadiakses> tanggal 01 November 2018
- Karyono, 2013.*Forensic Fraud*.Edisi I. Yogyakarta. ANDI
- Kurnia, Indra. 2014. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan*.Vol 2 No 1 Tahun 2014. Seri C. Jurnal Ekonomi. UniversitasNegeri Padang
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik :Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Diakses tanggal 05 November 2018
- Sanuari, Nilam. 2014. *Pengaruh system pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan moralitas manajemen terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi*.Vol 2 No 1 Tahun 2014 Seri D.Jurnal Ekonomi. Universitas Negeri Padang
- Tunggal, Amin Widjaja. 1992. *Pemeriksaan Kecurangan*. Jakarta. Rhineka Cipta
- Veithzal,Rivai.2005.*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik* .Edisi 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.